

## Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai

### *Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance*

**Soetji Andari**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: soetjiandari@gmail.com, HP. +6285643916275

Diterima 17 April 2017, diperbaiki 12 Agustus 2017, disetujui 4 November 2017

#### *Abstract*

*The Ministry of Social of the Rep. of Indonesia launched a non-cash assistance program in liaise with Joint Business Groups (KUBE) and Hope Family Program (PKH) in the context of reducing poor society effort. It was a further step and the government's commitment to reduced poverty in Indonesia. The distribution of non-cash social assistance system is to prevent the one that is inappropriate in its quality and quantity. Some beneficiaries of Hope Family Program and a Through non-cash Welfare Rice Program (Rastra) attended to gather in a small shop / stall that was appointed as an electronic service provider stall (e-warong). This system is a way to prevent mala-practices of social assistance distribution and to ensure its effectiveness in reaching the target, the amount and the time allocation. This research used a qualitative approach as it was conducted to know the implementation of the non-cash social assistance in Kediri District and that of in Madiun District. The result of the research showed that it needed either legality in its implementation of e-warong, and some technical managerial assistance for the e-warong managers, and also it needed some support of internet network facility and its infra-structures.*

**Keyword:** *alleviation; non-cash assistance; poverty*

#### **Abstrak**

Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan non tunai Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan masyarakat miskin. Hal tersebut merupakan langkah lanjut dan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Sistem penyaluran bantuan sosial non tunai bertujuan untuk mencegah distribusi yang tidak tepat secara kualitas dan kuantitas. Beberapa penerima program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) terlihat berkumpul di salah satu warung yang ditunjuk sebagai penyedia layanan elektronik warung. Sistem tersebut mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial agar tepat guna, sasaran, jumlah dan tepat waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin mengetahui penyelenggaraan bantuan non tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kediri dan Madiun. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan e-warong perlu ada legalitas, pengelola perlu mendapat bimbingan teknis terutama keterampilan managerial, perlu dukungan sarana dan prasarana berupa jaringan internet.

**Kata kunci:** **bantuan non tunai; kemiskinan; pengentasan**

#### **A. Pendahuluan**

Kediri merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 23.770 jiwa dengan persentase 8,51 persen. Tahun 2016 turun menjadi 23.640 jiwa dengan persentase 8,40 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015 untuk Kota Kediri sebesar 1,4 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,43. Tahun 2016 indeks

kedalaman kemiskinan sebesar 0,96 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,20. Apabila jarak antara indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan semakin kecil dapat dikatakan perekonomian stabil. (BPS Kota Kediri, 2016). Berdasar data yang dirilis BPS tersebut menunjukkan, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,11 persen.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2016).

Turunnya jumlah penduduk miskin tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk terus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Berkaitan upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri membagi dalam empat kluster. Kluster pertama, pemerintah memberi bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kluster kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kluster ketiga yakni pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK). Kluster keempat adalah peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Kecamatan Mojojoto memiliki jumlah UMK terbanyak yaitu 14.511 usaha, selanjutnya Kecamatan Kediri Kota Kediri dengan 13.721 usaha dan Kecamatan Pesantren dengan 10.574 usaha. Perusahaan yang termasuk unit menengah besar (UMB), jumlah usaha terbanyak di Kecamatan Kota yaitu 658 usaha, Kecamatan Mojojoto 250 usaha dan Kecamatan Pesantren 218 usaha. Rata-rata tenaga kerja di Kecamatan Kota untuk UMK 2,62 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Mojojoto untuk UMK 2,03 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Pesantren UMK 1,88 orang dan UMB 43,33 orang. Hasil gula dan padi yang melimpah di Kediri belum membawa kemakmuran menyeluruh bagi masyarakat, meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 23.770 jiwa dengan prosentase 8,51 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 23.640 jiwa dengan prosentase 8,40 persen.

Pemerintah sudah mengupayakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, melalui usaha ekonomi produktif,

Kelompok Usaha Bersama (Kube), program keluarga harapan (PKH), BPNT, rumah tinggal layak huni (Rutilahu), lumbung ekonomi desa, rumah kita, dan kartu elektronik yang diterbitkan oleh lembaga perbankan (BRI dan BNI), terakhir program pengentasan kemiskinan diluncurkan dalam program warong elektronik (e-warong), merupakan program bantuan dari Kementerian sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin secara non-tunai. (BPS Kota Kediri, 2016)

Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, terletak 169 km sebelah barat Kota Surabaya, atau 114 km sebelah timur Kota Surakarta. Madiun memiliki julukan Kota Gadis singkatan dari Perdagangan dan Industri. Pemerintah Kota Madiun memberi nama Madiun Kota Gadis karena pemerintah setempat berupaya mengembangkan sektor industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan yang sudah ada di Kota Madiun adalah PT. INKA atau Industri Kereta Api Indonesia, lima pabrik gula yang tersebar di Kota Madiun atau kabupaten, di bidang perdagangan terdapat lima pasar swalayan yaitu Sri Ratu, Matahari, Presiden Plaza, Giant dan Carrefour, serta pasar tradisional seperti Pasar Besar Madiun, dan Pasar Sleko.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS, berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Jiwan. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 km<sup>2</sup> terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Luas masing-masing adalah Kecamatan Manguharjo 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman 12,46 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 km<sup>2</sup>. Setiap kecamatan terdiri sembilan kelurahan sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Perbandingan kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan dalam kelompok penduduk usia produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah kelompok pen-

duduk usia 15 - 65 tahun, sedang penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan  $\geq 65$  tahun. Pada kelompok penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari pada penduduk usia  $\geq 65$  tahun.

Tabel Kelompok Usia Tidak Produktif  
Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

Usia	2009	2010	2011	2012	2013
<15 tahun	35.758	37.639	41.149	42.497	43.892
$\geq 65$ tahun	17.265	18.026	17.399	16.939	17.683

Sumber data : BPS Kota Madiun 2014

Kondisi masyarakat miskin di Kota Madiun dapat dilihat dari angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 kecuali pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan 0,18 persen. Pada tahun 2011, angka kemiskinan di Kota Madiun berada pada titik 5,66 persen atau menurun sebesar 0,45 persen. Di tahun 2012 angka kemiskinan adalah sebesar 5,35 persen atau menurun sebesar 0,31 persen berdasarkan data BPS yang dipublikasikan. Tahun 2013 dikarenakan belum ada data resmi dari lembaga yang berwenang maka hanya memproyeksikan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya. Berdasar analisa data proyeksi, angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2013 adalah sebesar 5,22 persen, diproyeksikan turun sebesar 0,13 persen dari tahun 2012.

Dalam upaya pengentasan masyarakat miskin, program penanganan kemiskinan dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga terkait dengan peluncuran perdana bantuan non tunai Kube PKH merupakan langkah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. E-warong Kube PKH merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai kepada masyarakat kurang beruntung secara tepat, cepat, dan mudah melalui kartu keluarga sejahtera (KKS). Program ini merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk

memudahkan transaksi ekonomi kepada warga penerima PKH. Bantuan non tunai merupakan arahan presiden untuk merumuskan bantuan subsidi non tunai kepada masyarakat. Bantuan non tunai menyediakan kebutuhan pokok yang lebih murah dibanding warung sekitar. Penerima bantuan BPNT dapat mengkonversikan bantuan menjadi beberapa kebutuhan pokok, bukan hanya beras. Program bantuan non tunai memungkinkan para penerima raskin untuk mengkonversikan bantuan BPNT raskin Rp 110 ribu per bulan, dengan memilih membeli beras, gula, minyak goreng dan tepung, empat item itu bisa dikonversikan dari bantuan raskin. Pelaksanaan e-warong bekerjasama dengan bank milik negara yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Keterlibatan perbankan (BRI dan BNI), Bulog, dan koperasi adalah program yang dilakukan melalui pemberian bantuan non tunai yang disalurkan melalui e-warong, pembelian dilakukan dengan sistem non-tunai menggunakan kartu elektronik. Masyarakat penerima dana bantuan sosial dapat mencairkan bantuan di e-warong Kube PKH. Sistem e-warong menjadikan masyarakat lebih fleksibel mencairkan dana karena tidak perlu datang ke bank. E-warong menampung bantuan sosial dari Kube, PKH, dan BPNT.

Menteri Sosial menargetkan hingga akhir tahun 2016 terdapat 300 bantuan non tunai dan pada tahun 2017 target ditambah menjadi 3000 e-warong. Peluncuran pertama bantuan non tunai telah dilakukan pada Juni 2016 di Kota Malang, sampai bulan September telah diluncurkan 21 e-warong. B2P3KS Yogyakarta melakukan kajian bantuan non tunai yang diluncurkan di Kediri dan Madiun. Rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimanakah penyelenggaraan bantuan non tunai yang dilakukan di Kediri dan Madiun. Berdasar rumusan masalah tersebut, tujuan kajian adalah diketahui penyelenggaraan bantuan non tunai di Kediri dan Madiun. Hasil kajian diharapkan dapat memberi masukan pada Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin dalam program

penyelenggaraan bantuan non tunai guna pemberdayaan masyarakat miskin.

## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, objek penelitian penyelenggaraan bantuan non tunai yang dilihat melalui *Context, Input, Process dan Product* (CIPP) untuk mengetahui penyelenggaraan bantuan non tunai di Kediri dan Madiun (Prastowo, 2011). Lokasi pengkajian ditentukan berdasarkan purposive dengan pertimbangan lokasi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai tempat penyelenggaraan e-warong. Informasi dari pelaksana adalah untuk mengetahui pelaksanaan e-warong di Kota/Kabupaten Kediri dan Kota Madiun di Jawa Timur.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan bantuan non tunai meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi, ketepatan sasaran, dan penyaluran dana bagi penerima manfaat PKH dan BPNT. Penelitian juga mengkaji beberapa aspek dari sisi penerima (*beneficiary assessment*), khususnya untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang *launching* e-warong yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, BPNT, berdasar sudut pandang masyarakat miskin penerima manfaat (Syawie, 2011).

Wawancara dilakukan kepada pengurus dan anggota di empat e-warong yang *dilaunching* yaitu E-warong Harapan Kita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, E-warong Sanjaya, Kota Kediri, E-warong Sinar Mulyo Lirboyo Kota Kediri, E-warong PKH Sinar Mulya, Kota Madiun, serta lembaga kerjasama dalam pelaksanaan e-warong yakni BNI, BRI, Kementerian Koperasi melalui Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), Bulog, pengurus e-warong, penerima manfaat bantuan pangan non tunai dan masyarakat sekitar e-warong. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pengelola e-warong, penerima manfaat, pemangku kepentingan (bank, bulog, dan KMIS) dan observasi dalam hal sarana dan prasarana yang disediakan, ketersediaan sembako dan alat perlengkapan lain

seperti dukungan jaringan internet, alat transaksi, aktivasi pencairan dana.

## **C. Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai**

Dasar pemikiran dan tujuan didirikan e-warong pada dasarnya mewujudkan sistem keuangan nasional yang inklusif yang dapat menyalurkan semua bantuan sosial dan subsidi oleh pemerintah secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan sehingga memudahkan kontrol, pemantauan, dan mengurangi penyimpangan. Pada peluncuran e-warong telah dipersiapkan beberapa lokasi yaitu: 1) E-warong Kube Harapan Kita, Jalan Tentara Zen Kelurahan Telung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; 2) E-warong Kube Sanjaya, Jalan Banjaran Gang I/67- RT 117 Kediri; 3) E-warong Kube Sinar Mulya, Jalan Sitihinggil No 1 RT 03. Rw 3 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; 4) E-warong Kube Cahaya Harapan, Jalan Imam Bonjol No 26 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Keempat lokasi telah sesuai dengan prinsip dasar pemikiran pendirian yakni kemudahan pencairan bantuan sosial non tunai bagi masyarakat miskin, khusus bantuan sosial peserta PKH dan BPNT. Sistem tersebut mencegah terjadinya penyimpangan artinya sistem ini membuat penyaluran bantuan sosial dapat tepat guna, sasaran, jumlah dan tepat waktu. Penyelenggaraan terintegrasi dengan semua pihak yang terlibat yakni pemerintah daerah terkait, perbankan, KMIS dan Bulog. E-warong dipersiapkan bagi pemasaran hasil Kube atau UEP di wilayah tersebut, salah satu lokasi sudah memasarkan hasil produk Kube mandiri terutama lokasi e-warong Harapan dalam bentuk roti, keset, tas, dan makanan kecil.

Sasaran e-warong mengacu basis data terpadu (BDT) yang dikelola Kementerian Sosial berdasar aturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2011, ada 40 persen orang yang paling bawah tingkat ekonomi, dari 40 persen tersebut diambil 10 sampai 11 persen yang terbawah. Jumlahnya ada enam juta keluarga menjadi

target penerima PKH tahun 2016, sedang untuk penerima BPNT ada 25 persen sekitar 15,5 juta keluarga, jadi jumlah penerima BPNT lebih besar. Sasaran e-warong menerima bantuan sosial PKH sebesar 950 ribu sampai 2,3 juta rupiah dan BPNT yang merupakan penerima PKH mendapat 15 kg per keluarga per bulan.

Target penerima manfaat mendapat bantuan non tunai adalah dapat tercukupi kebutuhan pangan, target ideal yang dianjurkan setiap bantuan non tunai adalah 500 sampai 1000 PM. Target pelayanan yang diberikan di E-warong Kube Harapan Kita 527 PM; target di E-warong Kube Sanjaya 600 PM; target di E-warong Kube Sinar Mulya 384 PM dan di E-warong Kube Cahaya Harapan baru mencapai 357 PM. Target pendirian bantuan non tunai untuk tahun 2016 sebanyak 300 e-warong dan tahun 2017 sebanyak 3000 e-warong di seluruh Indonesia. Satu kecamatan diharap memiliki satu e-warong dan idealnya melayani 1000 PM. Berdasar hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kedudukan hukum e-warong masih dalam proses legalisasi.

Penerima manfaat mendapatkan pelayanan berupa pencairan dan pengaktifan kartu untuk mengakses kebutuhan pokok berdasar besar bantuan sosial yang ditetapkan melalui agen bank. E-warong dapat menampung dan memasarkan hasil karya anggota Kube. Pemasaran hasil Kube baru ada di satu lokasi yaitu di Kube Cahaya Harapan Madiun berupa keset, tas, snack, dan camilan.

Jangkauan anggota di empat lokasi telah mempertimbangkan jarak dengan penerima manfaat yakni kurang lebih lima kilometer dari tempat tinggal peserta. Hal ini sesuai dengan prinsip bantuan non tunai dekat dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam pencairan dan tidak perlu mengantri, penerima manfaat dapat mengakses ketersediaan bahan pokok sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Berdasar hasil temuan tersebut direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, melalui kegiatan e-warong perlu dilakukan

antara lain: (1) Penerima bantuan sosial ke depan tidak hanya penerima manfaat PKH dan BPNT, tetapi juga keluarga disabilitas dan keluarga miskin yang perlu bantuan; (2) Dasar pemikiran untuk bantuan sosial non tunai diperluas dari berbagai sumber, lembaga terkait lain seperti PM Rutilahu, usaha ekonomi produktif (UEP) atau Kube, dll; (3) Jenis barang yang dijual ditambah sesuai kebutuhan masyarakat, seperti: alat tulis, perlengkapan sekolah, kebutuhan ibu hamil dan bayi; (4) Target ideal 500-1000 PM belum semua terpenuhi, perlu penambahan disesuaikan *database* yang sudah ditentukan, sehingga PM yang belum mendapat bantuan segera mendapat haknya; (5) Bantuan non tunai sebagai embrio koperasi perlu dipercepat legalitasnya agar berbadan hukum.

Variabel input akan dilihat dalam legalitas, pendampingan, bantuan, sarana dan prasarana, SDM, organisasi, keterlibatan pemangku kepentingan dan jejaring. Temuan lapangan akan dijelaskan sebagai berikut: Legalitas pelaksanaan bantuan non tunai di empat lokasi didukung semua pihak yakni pemerintah setempat seperti bupati/ walikota, Himbara, KMIS, dan Bulog. Dukungan berbagai pihak mempunyai peran masing-masing dalam pelaksanaan e-warong. Perbankan menyiapkan rekening bagi setiap peserta PKH berikut aplikasi dan koneksi internet, Bulog menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibeli oleh peserta PKH dengan sistem non tunai, KMIS sebagai koordinator bantuan non tunai koperasi yang mengendalikan aturan main bantuan non tunai termasuk berbicara dengan bank, bulog, retail, sehingga perkembangan kebutuhan pokok bisa dipantau, harga terjangkau dan lebih murah. Keempat lokasi telah mempunyai legalitas dan mekanisme penyelenggaraan e-warong.

Pendampingan pelaksanaan bantuan non tunai di empat lokasi dengan memberdayakan pendamping PKH, pekerja sosial dan anggota PKH. Pendamping PKH minimal sarjana sehingga mempunyai keterampilan bidang informasi teknologi (IT) yang baik. Keempat lokasi telah menunjuk ketua. Pengelola, agen bank dan

ketua e-warong adalah salah seorang penerima manfaat PKH. Hal tersebut untuk menghindari adanya pemotongan bantuan oleh pendamping atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bantuan sosial non tunai terbatas untuk penerima manfaat PKH dan BPNT (anggota PKH), bantuan untuk penguatan SDM pengelola e-warong belum maksimal. Pengelola baru ada satu orang yakni bendahara yang telah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi sebelum pelaksanaan e-warong. Bantuan modal usaha belum ada karena masih diperlukan legalitas agar lebih mudah mengakses segala bantuan untuk pengembangan e-warong. Pengadaan sarana dan prasarana e-warong cukup representatif karena berada di tengah masyarakat miskin dan dapat terjangkau. E-warong membutuhkan aplikasi berbasis internet untuk memudahkan transaksi secara *online*. Keberadaan pendamping sangat penting untuk keberlangsungan e-warong karena membantu masyarakat yang belum mengerti tentang internet.

Keberadaan e-warong sebagai pusat penyaluran bantuan non tunai atas inisiatif pendamping atau anggota PKH, artinya anggota masyarakat peduli terhadap program ini dan bersedia rumahnya sebagai tempat e-warong. E-warong dilengkapi sarana penunjang lain seperti etalase, rak, dan mesin *EDC* (*Electronic Data Capture*). Mesin *EDC* berfungsi tidak hanya sebagai alat gesek tunai tetapi juga sebagai alat transaksi pembayaran belanja di seluruh lokasi.

Sumber daya manusia pada bantuan non tunai harus dapat mengajarkan orang miskin akan teknologi. SDM yang menangani e-warong adalah pendamping PKH yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 15 ribu orang yang melayani 6 juta orang penerima PKH. Jumlah pendamping hingga saat ini 26 ribu artinya satu orang mendampingi 250 sampai 300 penerima PKH. Pendamping PKH adalah sarjana yang memiliki keterampilan di bidang IT, sehingga pendamping mampu bekerja dengan baik dan dapat menularkan keterampilannya kepada pe-

ngelola e-warong. Di empat lokasi, ketua adalah pendamping PKH artinya sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan e-warong.

Keberadaan organisasi bantuan non tunai sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di empat lokasi. Pemerintah daerah dan perbankan berperan aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai. Hal ini guna menyukseskan program penyaluran bantuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan bantuan non tunai. Di semua lokasi susunan organisasi terdiri ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan anggota (berjumlah sepuluh orang).

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyalurkan bantuan sosial secara non tunai memanfaatkan layanan sistem pembayaran Himbara. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemerintah bersinergi dan mendukung transformasi pembayaran penyaluran bantuan sosial yang semula tunai menjadi non tunai. KMIS memayungi e-warong dan memberi izin usaha mikro kecil kepada e-warong Kube PKH. Izin usaha mikro kecil dibutuhkan e-warong agar memiliki legalitas dan dapat berkembang lebih baik. Berdasar hasil temuan lapangan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, bahwa kegiatan e-warong perlu dilakukan: (1) Legalitas e-warong secara tertulis (berbadan hukum) dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan non tunai (2) Pengelola e-warong merupakan agen bank dan penerima manfaat perlu mendapat bimbingan teknis dalam pengelolaan bantuan non tunai terutama keterampilan managerial, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota. Pengelola dituntut untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, berupaya menggali dan memanfaatkan sumber yang tersedia. Selain itu, diharapkan dalam berorganisasi dapat menumbuhkan sikap dan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial baik kepada keluarga binaan sosial maupun masyarakat luas. (3) Sarana dan prasarana dukungan jaringan terkoneksi internet yang baik sehingga dapat

mengakses basis data secara *online* dengan cepat pada waktu transaksi. Mesin *EDC* sebagai alat untuk transaksi menggunakan kartu debit yang diberikan oleh bank. Mesin dikeluarkan oleh pihak bank untuk para penerima manfaat yang telah bekerjasama dengan hampir seluruh e-warong. (4) Struktur organisasi, pembagian tugas dan uraian tugas jelas. (5) Keterlibatan pemangku kepentingan dan jejaring perlu diperluas dengan pihak terkait sesuai kebutuhan bantuan yang akan diberikan atau dicairkan.

Variabel proses akan dilihat dari kelayakan, sosialisasi, analisis kebutuhan, analisis potensi dan sumber, serta penyelenggaraan e-warong. Temuan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelayakan program bantuan non tunai sangat strategis dalam pengentasan dan pemberdayaan keluarga miskin, karena bantuan non tunai merupakan agen bank artinya orang miskin tidak lagi menjadi penonton akan tetapi menjadi pelaku karena bantuan non tunai adalah milik orang miskin dan dikelola mereka dan pendamping dengan kebijakan langsung didukung teknologi. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, memudahkan pengontrolan bantuan dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat.

E-warong merupakan tempat pendistribusian bantuan non tunai dan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. E-warong bagian dari koperasi, tempat menjual sembako murah dan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat untuk terpenuhi kebutuhan secara cepat. Keempat e-warong sebagai lokasi penelitian dianggap layak karena mempunyai nilai strategis dalam pengentasan dan pemberdayaan keluarga miskin. Anggota pengelola e-warong adalah peserta PKH artinya orang miskin telah menjadi pelaku pengentasan kemiskinan. Salah satu penerima manfaat, menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali menggunakan kartu elektronik tanpa memegang uang *cash*, dan merasakan uang yang tersimpan aman.

Sosialisasi penyelenggaraan bantuan non tunai dilakukan bertujuan agar masyarakat menge-

tahui cara pencairan bantuan dari tunai menjadi non tunai. Keempat lokasi sudah melakukan sosialisasi kepada PM PKH dan BPNT. Analisis kebutuhan bantuan non tunai adalah tempat penyaluran dana bantuan sosial bagi PM, program ini sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo sejak November 2014 atau sebulan setelah dilantik sebagai presiden. Kementerian Sosial telah berkomunikasi dengan 18 Kementerian atau Lembaga Negara lain yang memiliki program bantuan sosial. Penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi telah melibatkan perbankan negara (BRI, BNI, BTN dan Mandiri), Bulog, dan KMIS.

Analisis potensi dan sumber penyelenggaraan bantuan non tunai dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal tersebut karena pengurus dan penerima manfaat program bantuan non tunai mampu mengikuti kegiatan melalui jaringan kerja sama antar kelompok lokal dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial. Selain itu dengan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peranserta masyarakat. Warga penerima PKH dan Rastra, mendapat kartu sebagai bukti penerima program tersebut. Mereka cukup datang ke warong yang ditunjuk untuk memilih barang yang ingin dibeli, dengan berbekal kartu program dan nomor pin, transaksi bisa dilayani.

Pelaksanaan di lapangan sudah ada jejaring dari pemerintah daerah setempat seperti Himbara, Bulog, KMIS dan Kube di wilayah tersebut. Pengelola bantuan non tunai di empat lokasi melibatkan pendamping sosial. Bantuan non tunai diharapkan melibatkan keterampilan kerja dan usaha masyarakat miskin yang ada (Kube). Dari empat lokasi penelitian, ada satu lokasi yang melibatkan pemasaran hasil Kube yaitu Kube Cahaya Harapan di Madiun dalam bentuk tas, keset, dan camilan. Tempat penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi adalah inisiatif dari pendamping PKH, artinya ada kepedulian terhadap program pengentasan kemiskinan. Tempat penyelenggaraan bantuan non tunai perlu ada legitimasi yang jelas seperti

sewa atau kontrak, pinjam atau milik sendiri. Sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bisa dikonversi ke gula, minyak goreng, dan tepung terigu, bansos sedang diupayakan untuk bisa dikonversi dengan gas elpiji 3 kg. Beberapa ibu penerima PKH dan Rastra terlihat berkumpul di salah satu warong yang ditunjuk sebagai penyedia layanan elektronik warong.

Penyelenggaraan e-warong pada bantuan non tunai didukung ketersediaan sarana, tempat, dan keberadaan e-warong. Empat lokasi penelitian telah memiliki tempat untuk penyelenggaraan bantuan non tunai yaitu E-warong Harapan Kita di Jalan Tentara Zen, Kelurahan Telung Rejo Kecamatan Pare, Kabupten Kediri, E-warong Sanjaya di Jalan Banjaran Gang I/67- RT 117 Kediri, E-warong Sinar Mulya di Jalan Sitihinggil No 1 RT 03. Rw 3 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto Kota, E-warong Cahaya Harapan di Jalan Imam Bonjol No 26 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Sistem distribusi berbasis *online*, memerlukan aktivasi KKS, sistem pencairan dana dan administrasi dalam penyelenggaraan bantuan non tunai perlu disiapkan secara terorganisir, jelas dan mudah diterapkan. Dari hasil pengamatan dan wawancara di empat lokasi ternyata kesiapan untuk penyelenggaraan bantuan non tunai belum seluruhnya berjalan baik, masih ada yang belum terorganisir jelas, memerlukan pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu turun tangan mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga pencapaian yang diharapkan dapat terwujud. Mekanisme pengaduan belum teridentifikasi di empat lokasi e-warong.

Hasil temuan penelitian lapangan direkomendasikan kepada Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, melalui kegiatan e-warong perlu dilakukan antara lain: anggota dan pengelola e-warong perlu melibatkan lebih banyak PM, artinya mereka adalah pelaku dalam mengentaskan dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sosialisasi perlu dilakukan kepada PM PKH dan BPNT serta masyarakat

miskin sesuai sumber bantuan yang akan diberikan pihak terkait. Pemangku kepentingan dapat melakukan jejaring secara luas dengan berbagai instansi untuk memudahkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial. Pelaksanaan secara terpadu memudahkan program bantuan non tunai dalam satu kartu kombo yang berfungsi untuk menampung berbagai bantuan sosial. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan mengembangkan analisis sumber yang sesuai dengan ragam dan bentuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada PM. Penyelenggaraan bantuan non tunai memerlukan sistem pengaduan penyelenggaraan e-warong secara terpadu sehingga memudahkan apabila ada keluhan. Sosialisasi mekanisme pengaduan berkaitan dengan bentuk dan jenis bantuan non tunai, yang mudah, cepat, dan responsif. Pelaksanaan e-warong perlu pengawasan secara reguler dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan agar hasilnya dijadikan sebagai rujukan untuk perbaikan program selanjutnya.

Variabel *product* dapat dilihat dalam *output* dan *outcome*. *Output* dilihat dari kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. *Outcome* dapat dilihat dalam perubahan perilaku warga miskin, terjamin hak hidup, rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap kehidupan, ketahanan sosial, meluasnya partisipan dan pengelolaan keuangan keluarga. Temuan di lapangan dapat di gambarkan sebagai berikut.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ternyata bantuan sosial yang diberikan anggota PKH dan BPNT, kecukupan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan di empat lokasi pada saat ini belum seluruhnya terpenuhi karena masih ada kendala seperti penyaluran, transportasi, serta sosialisasi yang tumpang tindih. Kebutuhan papan perlu bantuan sosial lain yang dapat mendukung pembangunan rumah seperti bahan bangunan yang relatif terjangkau. Masyarakat miskin perlu subsidi untuk bahan bangunan. E-warong diharapkan dapat memfasilitasi bahan bangunan untuk mencukupi kebutuhan papan.

Indikator penelitian *outcome* dilihat dari perubahan perilaku warga miskin. Perubahan perilaku penerima manfaat miskin diharapkan tidak konsumtif, artinya walaupun mereka dapat bantuan sosial belanja sesuai kebutuhan, sisanya dapat menabung di rekening bank. Hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat, mereka merasa senang dengan adanya e-warong, karena dapat menyimpan uang secara aman di bank dan memudahkan transaksi bila perlu.

Penerima manfaat terjamin hak hidupnya karena ketercukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi disertai kesehatan yang baik akan membentuk SDM yang berkualitas, diharapkan ke depan dapat memutus rantai kemiskinan. Mereka tumbuh kepercayaan diri atas dasar kepemilikan penghasilan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Mereka dapat memasarkan hasil Kube di e-warong, merasa mandiri, berdaya dan tumbuh rasa percaya diri. PM di empat lokasi diarahkan memasarkan hasil Kube di e-warong, tetapi baru satu lokasi yaitu E-warong Cahaya Harapan memasarkan hasil kelompok usaha bersama berupa tas, keset dan makanan ringan.

Penerima manfaat memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial melalui bantuan sosial non tunai yang disatukan dalam satu kartu kombo. Mereka dapat mencairkan sesuai kebutuhan dan harus mengatur keluar masuknya bantuan serta memakai bantuan secara tepat, artinya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Mereka berhati-hati dalam menyairkan dana dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan, sikap ini menunjukkan tanggungjawab terhadap bantuan yang diterima.

Penerima manfaat memiliki ketahanan sosial berupa ketangguhan serta keuletan dan kemampuan mengembangkan potensi diri setelah mendapatkan bantuan non tunai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Melalui bantuan non tunai masyarakat miskin dapat tercukupi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kemandirian usaha.

BPNT sebagai salah satu cara menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan daerah. Kondisi tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan dan kriminalitas dalam masyarakat sehingga tercipta lingkungan aman dan akhirnya ada ketahanan sosial dalam masyarakat. Masyarakat miskin dapat mengelola keuangan sesuai yang diharapkan dan mencukupi kebutuhan dasar artinya melalui kartu kombo yang multi fungsi keluarga miskin dapat menggunakan bantuan sosial sesuai kebutuhan dan kepentingan keluarga.

Berdasar hasil temuan lapangan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin dalam kegiatan e-warong perlu ada buku pedoman tentang pelaksanaan BPNT agar lebih efisien dan efektif bagi pengelola dan penerima manfaat. Memiliki indikator keberhasilan di setiap tahap agar dapat terukur kinerja dan capaiannya atau keterjaminan hak hidup bagi masyarakat miskin, kepercayaan diri, pengelolaan keuangan keluarga dan tanggungjawab terhadap kehidupannya. Bantuan pangan non tunai Kube dan PKH dikembangkan oleh PT BNI untuk daerah perkotaan dan PT BRI untuk daerah perdesaan agar penyaluran bantuan sosial pemerintah lancar.

#### **D. Penutup**

Penerima manfaat mendapat bantuan non tunai Kube PKH di Kota Kediri dan Kota Madiun bernaung di bawah Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), dukungan aplikasi layanan bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah di wilayah perkotaan oleh BNI sedang di perdesaan oleh BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan persiapan pelaksanaan e-warong belum matang, karena belum ada kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional dan kejelasan kerja sama antarpihak. Selain kelengkapan regulasi, pelaksanaan e-warong Kube PKH ke depan memerlukan beberapa prasyarat terkait pembangunan dan pemantapan organisasi, pengelolaan yang berfungsi sebagai titik distribusi bantuan

sosial non tunai, agen bank, penerima manfaat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Kendala lain yang dihadapi pengurus bantuan non tunai dan e-warong antara lain: belum seluruhnya mendapat pelatihan manajemen pengelolaan bantuan non tunai sehingga kegiatan pelaksanaan memerlukan bimbingan dan pelatihan manajerial. Koordinasi pengurus dilakukan oleh beberapa lembaga sudah dilakukan pada awal pendirian bantuan non tunai, namun perlu pendampingan dan bimbingan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga e-warong dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Perlu pembiasaan masyarakat untuk menggunakan kartu debit sehingga bantuan non tunai dapat berjalan dengan baik. Pelaksana bantuan non tunai memerlukan pendamping yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Keberadaan bantuan non tunai mendukung citra Kota Kediri sebagai *the service city* yang memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat dan Kota Madiun sebagai kota perdagangan, pendidikan, perindustrian. Faktor pendukung program bantuan non tunai karena antusias masyarakat yang mendukung program e-warong, keterlibatan dan kerjasama antarlembaga terkait yakni Bank BRI, BNI, Bulog, koperasi, peran pendamping dalam mensukseskan pendirian e-warong. Bank BRI sudah menciptakan layanan satu atap melalui *e-wallet* yang menampung berbagai macam bantuan dan layanan perbankan dalam satu kartu, sehingga transparansi pelaksanaan dan pengguna dapat terlihat langsung dari alat pembayaran elektronik yang digunakan dalam satu kartu. Di masa mendatang penerima manfaat bantuan sosial dapat melihat berbagai nilai bantuan yang diberikan, penggunaan serta saldo tabungan dalam kartu tersebut. Beberapa pengurus bantuan non tunai dan penerima manfaat sudah dilatih untuk menggunakan kartu debit, namun masih perlu pendampingan agar mekanisme yang dilakukan bantuan non tunai dapat berjalan lancar.

Harapan ke depan e-warong mampu menampung hasil produksi garapan kelompok usaha ber-

sama dan memasarkannya. Bank penyelenggara dapat melakukan kerjasama untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung kepada penerima manfaat. E-warong dapat berbentuk koperasi yang berbadan hukum. Penggunaan *e-wallet* dapat dilakukan di seluruh bantuan non tunai karena dapat menampung berbagai bantuan dari pemerintah secara transparan, tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Bantuan non tunai diharapkan menyediakan kebutuhan masyarakat miskin tidak hanya menyediakan barang yang dikonsumsi tetapi juga barang produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan Kube. Penerima bantuan sosial tidak hanya PM PKH dan BPNT tetapi juga diberikan kepada keluarga miskin yang perlu bantuan. Perlu ada legalitas formal untuk setiap e-warong. Pada akhirnya bantuan non tunai dapat memberdayakan masyarakat miskin memiliki tanggung jawab, percaya diri dan terjamin kebutuhan dasar.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun, aparat pemerintah setempat serta lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu telah membantu penelitian ini.

### Pustaka Acuan

- George Ritzer, (2002), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Michael Huberman, (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexi, (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pintowati, W., & Otok, B. W. (2012). *Pemodelan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Multivariate Adaptive Regression Splines Ensemble*. Jurnal Sains Dan Seni ITS. Retrieved from [http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains\\_seni/article/view/2072](http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/2072)
- Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam perpektif Rancangan Penelitian)*. In *Metode Peneli-*

- tian Kualitatif (Dalam perpektif Rancangan Penelitian)* (pp. 8–22).
- Rahardjo, (1999), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press.
- Riska dkk. (2007). *Makalah Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan*. Universitas Indraprasta Jakarta.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. *Jmpk*, 8(3), 121–129.
- Syawie, M. (2011). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. *Informasi*, 16, 213–219. Retrieved from <http://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/21f67d035eb50eff518309e438be4c8b.pdf>
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kediri kota, *Angka Kemiskinan di Kota Kediri Menurun*, <https://kedirikota.go.id>
- BPS Kota Kediri, *Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016* <https://www.kedirikota.go.id>

